

## TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN PERKEMBANGAN MADRASAH DARI MASA KE MASA DI INDONESIA

### TRANSFORMATION OF ISLAMIC EDUCATION INSTITUTIONS: A STUDY OF THE DEVELOPMENT OF MADRASAH FROM TIME TO TIME IN INDONESIA

Egi Prayogi Pangeresa<sup>1</sup>, Eka Putra<sup>2</sup>, Andri Nurjaman<sup>3</sup>

<sup>13</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Email: [egispi20@gmail.com](mailto:egispi20@gmail.com), [eka003455@gmail.com](mailto:eka003455@gmail.com), [andrienurjaman99@gmail.com](mailto:andrienurjaman99@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p>Received: 12-02-2022  Revised: 03-06-2020  Accepted: 28-06-2020</p> <p><b>Keywords:</b>  Transformation;  Islamic Education  Institutions;  Madrassah  Development;  Indonesia.</p>	<p><i>The transformation of Islamic educational institutions in Indonesia flourished during the late Dutch colonial rule in Indonesia due to two main reasons, namely the Dutch government's discriminatory attitude towards indigenous people in terms of education and the emergence of pan-Islamism which gave birth to a pattern and system of modern Islamic education. This article discusses the transformation of Islamic educational institutions and focuses on studying the development of madrasas from time to time in Indonesia. This article uses the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography using the challenge and response theory popularized by Arnold Joseph Toynbee. The results of the study show that Islamic educational institutions such as madrasas have existed since the time of the Prophet Muhammad Saw. and his companions who made the mosque a center of Islamic education. So that in the next development, the Khan Mosque was born, namely a mosque that has dormitory facilities for students of knowledge. Then during the heyday of Islam with the construction of madrasas in Naisaphur Iran and Madrasah Nidzamiyah in Baghdad. Madrasas entered the archipelago in the 20th century or at the end of Dutch colonialism in Indonesia, because Indonesian Muslims experienced discriminatory attitudes by the Dutch government and the emergence of the pan-Islamic movement so that at that time Indonesian Muslims established madrasas as Islamic educational institutions apart from the boarding school. After Indonesia's independence, madrasas were accommodated by the government through the Ministry of Religion and gave birth to many advances for the world of Islamic education in Indonesia.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b>  Transformasi;  Lembaga  Pendidikan Islam;  Perkembangan  Madrassah;  Indonesia.</p>	<p>Transformasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia subur terjadi pada masa akhir pemerintahan penjajah Belanda di Indonesia karena dua hal utama, yaitu sikap diskriminatif pemerintah Belanda terhadap kaum pribumi akan pendidikan dan munculnya <i>pan-Islamisme</i> dan melahirkan pola dan sistem pendidikan Islam yang modern. Artikel ini membahas mengenai transformasi lembaga pendidikan Islam dan berfokus pada kajian perkembangan madrasah dari masa ke masa di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu <i>heuristik</i>, <i>kritik</i>,</p>

*interpeta* dan *historiografi* dengan menggunakan teori *challenge and respons* yang dipopulerkan oleh Arnold Joseph Toynbee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam seperti halnya madrasah sudah ada sejak zaman Nabi Muhamamd Saw. dan para sahabat yang menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Sehingga pada perkembangan berikutnya lahirlah masjid khan yaitu masjid yang mempunyai fasilitas asrama bagi para penuntut ilmu. Lalu pada zaman kejayaan Islam dengan dibangunnya madrasah-madrasah di Naisaphur Iran dan Madrasah Nidzamiyah di Bagdad. Adapun madrasah masuk ke Nusantara pada abad ke-20 atau pada masa akhir penjajahan Belanda di Indonesia, dikarenakan umat Islam Indonesia mengalami sikap diskriminatif oleh pemerintah Belanda dan munculnya gerakan *pan-Islamisme* sehingga pada masa tersebut umat Islam Indonesia mendirikan madrasah-madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam selain dari pesantren. Setelah Indonesia merdeka madrasah diakomodasi oleh pemerintah melalui Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dan melahirkan banyak kemajuan bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah bidang yang paling terpenting dalam membangun peradaban suatu bangsa, melalui pendidikan akan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan yang baik ke depan bagi suatu bangsa dan negara, hal ini jelas tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat (Alawiyah, 2014).

Pendidikan Islam bagi umat Islam Indonesia sangat berperan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Pendidikan Islam berawal dari sistem dan metode yang sederhana dan tradisional, hal ini berbentuk langgar atau surau dan pesantren, materi yang disampaikan bersifat murni materi keislaman, metode mengajar adalah individual (sorogan), ceramah (bandongan) dan hafalan serta belum menggunakan klasikal apalagi meja, kursi dan papan tulis (Kosim, 2007).

Baru memasuki awal abad ke-20 di Indonesia berkembanglah model-model lembaga pendidikan Islam modern seperti madrasah dan sekolah umum yang bercirikan Islam. Lembaga pendidikan Islam modern tersebut dapat dilihat dari sistem kurikulum yang berbeda dengan lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada sebelumnya, yaitu lembaga pendidikan Islam modern mulai memperkenalkan mata pelajaran umum, menggunakan metode mengajar yang modern dan menggunakan sistem klasikal dengan memakai meja, kursi dan papan tulis (Kosim, 2007).

Kata madrasah berasal dari bahasa Arab dan terbentuk dari *isim makan* yang berasal dari kata *daratsa* yakni tempat duduk untuk belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, madrasah memiliki arti sekolah atau perguruan yang berdasarkan agama Islam. Beberapa ahli menyebutkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran dalam pengetahuan agama Islam (Mircea, 1993). Di Indonesia sendiri istilah madrasah telah menyatu dengan sekolah, baik formal atau perguruan yang bernaung di bawah binaan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Peran madrasah dalam membentuk karakter bangsa Indonesia sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Madrasah sebagai nama lembaga atau tempat yang mewujudkan proses transformasi ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang berarti dalam perjalanan sejarah perkembangan Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Madrasah diartikan sebagai istilah yang merujuk proses pembelajaran dari informal ke formal. Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam selain masjid dan pesantren (Supani, 1970).

Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan Islam, madrasah dibangun melalui tiga tahapan yaitu, masjid, Masjid-*khan*, dan madrasah (Asari, 1994). Pada awal perkembangan Islam masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga digunakan sebagai tempat yang multitugan. Pada saat itu mesjid banyak digunakan untuk sentral kegiatan masyarakat muslim. Masyarakat muslim saat itu telah memperluas fungsi masjid untuk berbagai kegiatan diantaranya adalah untuk sarana pengajaran, aula pertemuan bagi tentara, rumah pengadilan dan rumah penyambutan duta (Maksum, 1999b). Hingga akhirnya lahirlah madrasah sebagai tempat untuk kegiatan masyarakat, dengan begitu masjid pun kembali ke fungsi utamanya yaitu untuk kegiatan beribadah saja.

Menurut sejarahnya, madrasah muncul pertama kali di dunia Islam pada abad ke-4 atau ke-5, hal ini dibuktikan dengan adanya madrasah-madrasah di Naisaphur Iran dan Madrasah Nidzamiyah di Bagdad (Kosim, 2007). Madrasah sendiri mengalami proses yang begitu panjang, mulai dari munculnya di Timur Tengah pada abad ke-5 Hijriah. Proses kebudayaan tersebut, sampai ke Indonesia berkat para ulama yang mendalami ilmu agama di Timur Tengah. Sesampainya di Indonesia, proses pembudayaan madrasah itu sendiri mengalami tantangan dari para penjajah dan pada awal kemerdekaan masih dalam proses perkembangan. Maka barulah selepas kemerdekaan embrio madrasah ini lahir dengan stimulus organisasi masyarakat mulai mendirikan madrasah dimana-mana pada awal abad

ke-20 Masehi. Dalam artian bahwa munculnya madrasah di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu penjajahan Belanda dan gerakan pembaharuan Islam (Maksum, 1999a).

Penjajah Belanda yang mendiskriminasi Islam membuat dua gerakan umat Islam di Indonesia dalam menyelamatkan pendidikan Islam di Indonesia pada saat itu, *pertama* gerakan yang bersifat *defensif* oleh ulama tradisional dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam tradisional yaitu pesantren di daerah pedalaman untuk menghindari pengaruh dari penjajahan Belanda dengan mendidik santri dan mempersiapkannya untuk melawan penjajah Belanda tersebut. *Kedua* gerakan yang bersifat *progresif* yang berpandangan harus melawan penjajah Belanda dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern yang berbasis Islam. Gerakan ini dipelopori oleh ulama-ulama pembaharu, maka dari gerakan ini lahirlah *pertama* madrasah plus, artinya mata pelajaran agama ditambah dengan mata pelajaran umum, *kedua* sekolah plus, yaitu sekolah model Belanda ditambah mata pelajaran agama, dan *ketiga* madrasah diniyah yang sepenuhnya mata pelajaran agama (Madjid, 1997).

Reformasi pendidikan Islam khususnya madrasah di Indonesia tidak lepas dari perjuangan ulama dan organisasi Islam yang gencar membangun lembaga pendidikan Islam yaitu madrasah dengan menerapkan sistem dan manajemen pendidikan klasikal (Masykur, 2018).

Seperti halnya sekolah, madrasah merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang telah lama berdiri di Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai kecakapan hidup melalui kecakapan spiritual, intelektual, kecerdasan emosional dan akhlak mulia serta segala keterampilan yang mungkin diperlukan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Fathoni, 2020).

Madrasah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1090 di Sumatera Barat oleh Syekh Abdullah Ahmad, madrasah tersebut bernama Madrasah Adabiyah Padang. Lalu pada tahun 1910 berdiri Madrasah School dan berubah menjadi diniyyah school, lalu pada tahun 1916 di pondok pesantren Tebu Ireng berdiri Madrasah Salafiyah, pada tahun 1918 didirikan juga Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah (Hasbullah, 1995).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih muda dari pada pondok pesantren. Madrasah lahir di abad ke-20, seperti munculnya Madrasah Manbaul Ulum Kerajaan Surakarta pada 1905 dan Sekolah Adabiyah didirikan oleh Syekh Abdullah

Ahmad di Sumatera Barat pada tahun 1909. Madrasah itu berdiri secara inisiatif dan implementasi reformasi dari sistem pendidikan Islam yang sudah ada yaitu pondok pesantren (Haningsih, 2008).

Madrasah tentunya berbeda dengan pondok pesantren, walaupun sama-sama sebagai lembaga pendidikan Islam. Pondok pesantren sendiri adalah lembaga pendidikan Agama Islam dengan ciri khasnya yaitu siswa atau santrinya hidup bersama dan berada dibawah kepemimpinan seorang kyai, oleh karena itu pondok pesantren mempunyai subkultur sendiri. Menurut Zamakhsyar Dhofer dalam bukunya Tradisi Pondok Pesantren mengasumsikan setidaknya ada lima elemen pesantren yaitu kyai, santri, masjid, asrama, dan pengajian buku Islam klasik atau kitab kuning (Nurjaman, Yusuf, & Witro, 2021).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Data yang digunakan berasal dari sumber dokumen. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi: *heuristik*, *kritik*, *interpretasi* dan *historiografi*. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori *challenge and respons* dari Arnold Joseph Toynbee, dimana teori ini lebih ke arah melahirkan sebuah peradaban. Bagi Arnold, warga yang tinggal di dekat sungai senantiasa dihadapkan pada tantangan alam, dimana tantangan tersebut mendesak mereka buat senantiasa hidup. Maka timbullah sebuah pemikiran untuk menghadapinya, dimana keberhasilan dalam menghadapi sebuah tantangan tersebut melahirkan sebuah peradaban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Madrasah dalam Sejarah Awal Islam

Pembangunan masjid merupakan langkah awal Nabi Muhammad Saw. dalam membangun sebuah peradaban. Dimasanya, masjid bukan hanya sekedar sebagai tempat beribadah (Fadhli, 2022), fungsi lain masjid adalah sebagai sarana menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Pada masa kekhilafahan, tepatnya pada masa Umar bin Khatab RA terbukti banyak para pengajar yang dilegalkan dalam masa kepemimpinan Umar bin Khatab untuk mengajar di sebuah masjid tepatnya di Kota Damaskus, Basrah dan Kuffah. Pada masanya pula, fungsi masjid selain menjadi tempat ibadah, masjid juga dijadikan sebagai sarana edukasi yang senantiasa berjalan secara istiqomah. Namun banyak pula pembangunan masjid yang tidak memperhatikan akan tugas dan fungsinya yang hakiki. Bahkan disisi lain karena banyaknya pengajaran pada masa itu, menisbatkan nama masjid

tersebut terhadapnya. Semisal ada seorang pengajar yang bernama Al-Jabar di masjid tersebut, maka nama masjid tersebut adalah Masjid Al-Jabar, begitu pula pada kasus pengajar atau tokoh lainnya (Maksum, 1999b).

Pada perkembangan selanjutnya dalam perkembangan sejarah dunia pendidikan Islam tersebut terbukti adanya masjid-*khan*. Bangunan ini adalah sebuah sarana belajar mengajar yang terhimpun dalam satu wilayah dimana didalamnya terdapat sebuah *khan* atau pondokan untuk seorang santri yang belajar dan ingin bermukim disana. Namun pondokan tersebut biasanya selalu berada disamping masjid atau tidak jauh dari masjid (Drajat, 2018).

Dari beberapa teori akan pernyataan tentang sebuah masjid yang berperan penting dalam sebuah sarana pembelajaran, maka mulai dipertimbangkan akan perlunya sebuah pondokan atau *khan* tersebut guna tempat bermukimnya para penuntut ilmu yang berasal dari luar daerah. Dari beberapa pernyataan akan pertimbangan tersebut seperti: *pertama*, adanya sarana pembelajaran disebuah masjid dirasa mengganggu sarana ibadah yang memang seharusnya. *Kedua*, terjadi sebuah perkembangan akan kebutuhan ilmiah sebagai bentuk dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Maka hal ini tidak memungkinkan untuk terus belajar di masjid. *Ketiga*, munculnya tujuan baru dalam sarana pendidikan seperti kegiatan pembelajaran menjadi sarana dan lahan dalam mendapatkannya rizki bagi para pengajar. Hal ini dikarenakan sebagian pengajar hanya bertumpu pada kegiatan pembelajaran, oleh karenanya maka dibangunlah lembaga lain yang mungkin tidak akan diperolehnya di masjid (Maksum, 1999a).

Masjid-*khan* berbeda dengan masjid pada umumnya yaitu dilengkapi dengan bangunan asrama untuk tempat tinggal para santri selama mereka melangsungkan pendidikan di pondok. Kata *khan* secara umum memiliki arti penginapan, motel, atau sejenisnya. Maqdisi dalam kutipan Asari mengatakan bahwa dalam sejarah kebudayaan Islam, *khan* bisa diartikan sebagai bangunan yang memiliki fungsi sebagai gudang atau pusat perdagangan. Selain itu, ada pula *khan* yang dibangun untuk meningkatkan finansial dan didukung oleh wakaf serta penghasilannya nanti dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial (Asari, 1994).

Makna yang paling tepat untuk memahami istilah *khan* sebagai lembaga pendidikan masjid-*khan* adalah asrama. *Khan* dibangun sebagai wujud kependulian umat Islam pada masa tersebut terhadap para penuntut ilmu, khususnya bagi mereka yang berasal dari luar daerah. Tentunya keadaan tersebut tidak memungkinkan untuk pulang pergi begitu saja,



maka seorang penuntut ilmu tersebut semestinya mengurus akan tempat tinggalnya selama masa belajarnya. Maka, *khan* inilah yang menjadi jawaban pada persoalan seperti ini. *Khan* sendiri biasanya dibangun berdampingan dengan masjid, atau di lokasi yang tidak jauh dari masjid yang menjadi sarana transfer ilmu dikala itu. Setelah kedua tahap perkembangan di atas terwujud, barulah muncul madrasah yang diperuntukkan khusus sebagai lembaga pendidikan Islam.

Pengertian madrasah pada tahapan ini tidak bisa dikatakan dan diartikan madrasah sebelumnya yang telah dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Dimana madrasah hanya diperuntukan untuk kegiatan pendidikan setingkat SD dan SMP. Akan tetapi, madrasah pada tahapan ini lebih menunjukan kepada sebuah pendidikan tinggi yang lebih berkembang ke arah modern. Madrasah pada tahap ini juga tidak bisa diartikan setara dengan jenjang perguruan tinggi seperti sekarang karena memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hal ini, Hasan Asari berpendapat bahwa karakteristik dalam pendidikan ini tidak bisa disama artikan dengan sebuah lembaga pendidikan tingkat tinggi seperti sekarang ini. Maka dalam hal ini pula kata madrasah menimbulkan kesukaran dalam pemaknaanya itu sendiri. Seperti beberapa tokoh pendidikan Islam yang menulis madrasah tersebut dalam bahasa mereka secara beraneka ragam, maka ada yang menyebutkan *schule* atau *hochschule* dari bahasa jerman, *school*, *college*, atau *academy* dari bahasa Inggris (Maksum, 1999b).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad 11-12 M (abad ke-5 H), khususnya ketika Wazir Bani Saljuk, Nidzam Al-Mulk mendirikan madrasah Nidzamiyyah di Baghdad (Ainurrofiq et al., 2005). Hal tersebut bertujuan untuk menyebarkan pemikiran Sunni dalam menghadapi tantangan dan bahayanya sebuah pemikiran dari Syi'ah, sehingga ia menyediakan berbagai guru dari kalangan Sunni yang kemudian menyebar luaskannya hingga ke berbagai daerah. Selanjutnya adalah pembentukan kelompok pekerja Sunni yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam pendapat lain yang menyatakan bahwa madrasah itu telah didirikan sebelum abad ke-11, hal ini dijelaskan oleh Muhammad Abd. Rahim Ghanimah. Ia berpendapat didalam sebuah magnum ovusnya yaitu *Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Kubra* dimana hal itu dikutip pula oleh Maksum yang isinya, pada dasarnya data akan keberadaan sebuah madrasah belum dijumpai disumber-sumber sejarah secara pasti pada akhir abad ke-10.

Namun, secara pastinya yang dengan kuat dengan bukti yang ada madrasah itu telah berdiri sejak abad ke-10 jika dihubungkan dengan masyarakat Naisabur (Maksum, 1999b).

Penjelasan yang serupa dijelaskan oleh Asari, ia mengutip akan penjelasannya dari Ahmad Amin didalam kitabnya yang berjudul *Dhuhba' Al-Islam* dimana hal tersebut meruju penjelasannya Al-Dzahabi. Penjelasannya bersumber dari penelitian yang terjadi belakangan ini, madrasah telah menyebar dan terkenal secara luas di wilayah Naisabur yang secara *de facto* berada dibawah pemerintahan Dinasti Samaniyah, bahkan sebelum adanya dinasti Saljuk, maka hal tersebut tidak perlu dipertahankan. Akan tetapi madrasah sudah berkembang dan menjadi salah satu pusat budaya dan pendidikan di dunia Islam pada abad ke-10. Nama madrasah yang populer akan sebuah kelahiran madrasah yaitu pada masa Nizam Al-Mulk (Asari, 1994).

Keberadaan sebuah Madrasah Nizamiyah ini, melebihi pengaruh madrasah-madrasah yang sudah ada sebelumnya, hal tersebut sudah tidak bisa diragukan lagi. Sehingga Ahmad Syalabi menjadikannya sebagai tolak ukur perbedaan dengan tahap sebelumnya (Syalabi, 1983).

## **Perkembangan Madrasah di Indonesia Pra Kemerdekaan**

### **1. Perkembangan Awal Madrasah di Indonesia**

Sejarah madrasah di Indonesia bisa dibagi dalam dua periode sejarah, *pertama* pra atau sebelum kemerdekaan dan *kedua* pasca atau setelah kemerdekaan (Sauri, 2020). Pada pra kemerdekaan, pendidikan dan pengajaran agama Islam hanya dalam bentuk pengajian Al-Qur'an dan pengajian kitab klasik yang diselenggarakan di rumah tokoh agama Islam atau di surau, masjid dan pesantren. Dalam perkembangan selanjutnya pengajian-pengajian tersebut berubah menjadi madrasah yang mempunyai bentuk, kelembagaan, kurikulum, metode, struktur organisasi yang jelas dan modern (Sauri, 2020).

Madrasah adalah penghubung sistem yang lama dengan yang baru yaitu dengan mempertahankan yang lama dan baik dan mengambil sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, madrasah mempertahankan pembelajaran agama Islam ditambah dengan pelajaran atau ilmu pengetahuan umum lainnya.

Banyak teori yang berpendapat tentang sejarah munculnya madrasah di Indonesia, tetapi sangat sulit dipastikan kapan istilah madrasah digunakan sebagai salah satu jenis



pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Akan tetapi, kemunculan madrasah di Indonesia berlangsung pada awal abad ke-20 dengan maraknya madrasah dimana-mana (Drajat, 2018).

Mengenai perkembangan madrasah di awal abad ke-20 itu, jelas tidak bisa disamakan dengan perkembangan sebuah madrasah di Timur tengah. Bahkan sekalipun sama-sama sedang berkembang. Hal ini dikarenakan, proses perkembangan di Timur Tengan sudah kearah modern yang artinya terjadi satu kepaduan antara ilmu agama dan ilmu umum (Maksum, 1999b). Sementara itu, kasus di Indonesia mengenai madrasah sebelum abad ke-20 belum mengenalnya, akan tetapi lebih ke arah sebutan pengajian dan bahkan dalam praktiknya tidak adanya sebuah sistem klasikal seperti pada sekolah modern. Dalam hal ini, lebih meninjau ke arah pengajian dengan tinjauan sebuah kitab yang diajarkannya.

Keberadaan hadirnya madrasah pada abad ke-20, diperkirakan berbarengan dengan hadirnya ke-ormasan Islam dikala itu seperti Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Ada alasan yang memungkinkan kehadiran madrasah pada masa kolonial, diantaranya terjadi bebrapa kali usulan ilmu agama agar dimasukan dalam pendidikan umum. Namun melihat usulan tersebut, pemerintah kolonial membuat aturan baru yaitu *ordonantie Indische Staatsregeling* pasal 179 ayat 2 dengan isinya bahwa sistem pendidikan umum itu harus bersifat netral, dalam artian pengajaran itu harus menghormati akan agamanya masing-masing. Sedangkan pengajaran ilmu agama agar diberikan diluar waktu pendidikan umum (Dzaelani, 1982).

Hingga pengajaran agama atau *open baar orderwijs* ini pada kenyataannya tidak pernah terwujud di akhir pemerintahan Belanda di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menumbuhkan inisiatif untuk memberi muatan pelajaran Islam lebih di luar kebijakan Belanda, namun komposisi materi pendidikan agama Islamnya tentu berbeda dengan pesantren atau sejenisnya, lembaga tersebut yakni madrasah.

Berbagai literatur menjelaskan bahwa paling tidak ada beberapa alasan yang melatar belakangi munculnya madrasah di Indonesia. *Pertama*, adanya gerakan pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir yang dibawa oleh pelajar Indonesia dan kembali ke tanah air membawa semangat pembaharuan dalam pembangunan madrasah serta muatan ilmu yang diberikan. *Kedua*, sebagai respon dari tindakan masyarakat nusantara menanggapi kebijakan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah melakukan standar ganda dalam politik etiknya, seperti penyejahteraan pendidikan bagi yang menguntungkan

kepentingannya dan pengawatiran akan pendidikan Islam yang dinilai akan berdampak buruk bagi pemerintahannya. Pada awalnya pemerintah penjajah akan menggunakan tradisi pendidikan pribumi untuk menerapkan pendidikan dalam rangka politik etiknya akan tetapi hal ini tidak terjadi. Seperti dalam kutipan H. Maksu yang diungkapkan A. Steenbrink menyatakan bahwa:

*“Dalam membahas penelitian yang diperintahkan Gubernur Jenderal Fort van der Capellen pada tahun 1819, seorang sarjana Belanda Brugmen menduga bahwa pemerintah akan menerapkan pendidikan yang berdasarkan pribumi murni, secara teratur sesuai dengan masyarakat desa, yang dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dimungkinkan dengan alasan politik asosiasi Hindia Belanda. Tetapi hal ini dalam kenyataannya tidak terbukti”* (Maksu, 1999b).

Usulan tersebut sulit untuk direalisasikan pada saat tataran teknis dikarenakan tradisi pendidikan Islam saat itu dianggap tidak layak diadopsi oleh siswa baik dari sisi kurikulum, manajerial atau metode yang digunakannya. Hingga akhirnya bentuk persekolahan yang dikembangkan khususnya dalam rangka misionaris dibangun oleh pemerintahan penjajah Belanda (Dzaelani, 1982).

Pesantren yang menggunakan sistem dan metode pendidikan klasik, namun setelah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern dengan mengajarkan ilmu pengetahuan umum, maka di beberapa pesantren, hal ini direspon baik dengan melakukan pembaharuan sistem pendidikan dari tradisional ke modern. Seperti Madrasah Salafiyah di Pesantren Tebu Ireng, Madrasah di Pesantren Krapyak Yogyakarta, Madrasah Kudsiah di Kudus dan Madrasah Puyuh di Sukabumi Jawa Barat (Nasir, 2017).

Model reformasi sistem pendidikan madrasah pada awal perkembangannya di Indonesia meliputi isi kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum yang ditawarkan didasarkan pada model *hybrid* yang tetap mengajarkan mata pelajaran Islam serta mata pelajaran umum seperti literasi latin, aritmatika, bahasa, sains, IPS dan berbagai keterampilan. Metode yang digunakan menerapkan metode pembelajaran modern agar lebih efektif (Thoha, 2011).

## 2. Madrasah di Indonesia pada Masa Penjajahan

Pembangunan madrasah ini dilatar belakangi oleh adanya penjajah yang menjumpai sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama Islam dan telah disebarkan oleh para

wali. Pada saat itu sudah terbentuk pendidikan yang dikelola oleh masyarakat muslim dengan penekanan terhadap aspek-aspek pendidikan agama Islam. Pendidikan dilangsungkan di rumah-rumah, tajug, masjid, langgar yang diasuh oleh seseorang yang paham akan ajaran Islam dan terpanggil untuk menyampaikannya kepada masyarakat hingga akhirnya berkembang menjadi sebuah pondok pesantren (Drajat, 2018).

Pesantren ini dianggap menjadi sesuatu yang menarik bagi para sultan dan dianggap sangat berjasa. Hal ini berdampak terhadap adanya bantuan dari sultan sebagai bentuk perhatian khusus mereka. Salah satu contohnya yaitu Pesantren Tegalsari yang merupakan hadiah sultan bagi para kyai yang dianggap telah banyak berjasa (Shaleh, 2004). Sampai pada abad ke-19 Pondok Pesantren Tegalsari menjadi pondok terkemuka yang santrinya berasal dari berbagai penjuru tanah air.

Hingga tahun 1671 dalam jangka waktu yang cukup lama rombongan dagang VOC yang diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai wilayah Nusantara. Mereka membiarkan kegiatan pendidikan termasuk pesantren berjalan apa adanya. Dilain sisi tatkala keperluan akan tenaga terampil tingkat rendahan mulai meningkat, pemerintahan kolonial juga menyelenggarakan pengajaran melalui sistem persekolahan yang diselenggarakan sangat diskriminatif, terutama bila hal itu menyangkut penduduk pribumi.

Sistem persekolah pemerintah Hindia Belanda untuk rakyat Indonesia pada mulanya terbatas untuk kalangan bangsawan, yakni sekolah kelas satu yang disebut dengan *Hollands Inlandsche Scholl/* (HIS) dan sekolah kelas dua (*Standard School*). Sekolah-sekolah tersebut yang kemudian diselenggarakan dengan tujuan mencetak pegawai-pegawai pemerintah, pegawai perdagangan dan perusahaan. Dimana pada awalnya pemerintah Belanda hanya mengutamakan pendidikan bagi kaum mereka sendiri (Drajat, 2018).

Timbulnya berbagai alasan membuat pemerintah Hindia Belanda mengembangkan sistem persekolahan untuk rakyat luas dengan biaya murah. Pada awalnya rakyat hanya memperoleh pendidikan dari lembaga pendidikan tradisional termasuk di dalamnya pesantren. Hingga akhirnya rakyat bisa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sebelumnya telah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Gerakan ini ternyata memperoleh respon yang cukup bagus dari masyarakat. Sehingga munculah persaingan dalam dunia pendidikan.

Perkembangan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda cukup gencar dan diterima pula oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Sehingga menggugah para tokoh Islam

dalam menanggapi fenomena ini. Meskipun saat itu pemerintah Hindia Belanda telah memberikan kesempatan yang luas kepada warga pribumi untuk memperoleh pendidikan, ternyata masih nampak kebijakan yang bersifat diskriminatif. Kebijakan ini hanya bisa dirasakan sampai tingkat sekolah dasar dan hal tersebut sangat jauh bahkan bertolak belakang dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan mengutamakan pendidikan. Kesempatan ini juga harus menjadi momen bagi tokoh Islam saat itu untuk memberikan pendidikan Islam yang lebih baik. Bisa berupa metode, materi, kurikulum, manajerial, strukstruktur kelembagaan, dan sebagainya dengan tujuan agar pendidikan Islam dapat diterima oleh masyarakat luas sehingga mampu bersaing dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda (Drajat, 2018).

Permasalahan lain timbul kala pemerintahan Belanda tidak begitu responsif dengan perkembangan pendidikan Islam. Mereka menganggap bahwa pendidikan moral keagamaan Islam yang memberikan dapat memotivasi spiritual yang mungkin bisa membangkitkan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan, sehingga respon yang diberikan pun akan percuma karena tidak menguntungkan bagi mereka. Sehingga madrasah pada masa penjajahan Belanda mengalami sikap yang sangat diskriminatif. Madrasah dianggap ancaman dan faktor penghambat kepentingan penjajah di tanah Nusantara (Rasiin, 2003).

Adanya *Pan-Islamisme* dan gerakan pembaharuan Islam oleh pelajar di Timur Tengah dan Mesir berimbas terhadap merembahnya pendidikan Islam ke tanah air. Pelajar tersebut adalah mereka yang telah menuntut ilmu dan kembali ke tanah air, baik dari Mesir maupun yang telah bermukim di Makkah dan Madinah dengan tujuan belajar agama selama dua, empat, sampai enam tahun, dan bahkan ada juga yang belajar dalam kurun waktu yang lama. Sehingga kembalinya mereka ke Nusantara membawa nuansa gerakan pembaharuan khususnya dalam bidang pengajaran dan pendidikan Islam.

Seperti adanya Masdarasah Adabiyah di Sumatera yang didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada tahun 1908. Seiring berjalannya waktu madrasah ini berganti nama menjadi HIS Adabiyah pada tahun 1915. Selain itu, adanya Madrasah School di daerah Batusangkar dan adanya Diniyah School yang merupakan lanjutan dari Madrasah School dengan didirikannya oleh H. Muhammad Yunus pada tahun 1918.

Nuansa gerakan pembaharuan pengajaran Islam itu terus berlangsung sampai tahun 1930 yang diwarnai oleh Tengku Daud Beureuh dari Aceh dengan mendirikan Madrasah Saadah Adabiyah, disusul oleh Tengku Abdul Rahman Munasah Mencep dengan

mendirikan Madrasah Al-Muslim. Hal serupa mengenai nuasan gerakan pembaharuan ini, terjadi pula didaerah lainnya di Nusantara, seperti: Jawa dan Kalimantan.

Organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan banyak mendirikan madrasah dan juga sekolah umum dengan nama, jenis dan tingkatan yang bermacam-macam diantaranya:

- 1) Pada tahun 1912, Muhammadiyah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin/ Mu'allimat, Muballighin/ Muballighat dan Madrasah Diniyah.
- 2) Pada tahun 1913, Al-Irsyad mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tjahiziyah, Muallimin dan Tahassis.
- 3) Matlaul Anwar di Menes Banten mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah.
- 4) Pada Tahun 1926, Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya didirikan oleh Nahdhatul Ulama.
- 5) Pada Tahun 1928, Pesatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) mendirikan madrasah dengan berbagai nama, diantaranya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Tsanawiyah, Kuliyah Syariah (Shaleh, 2004).

Perkembangan madrasah semakin terus berkembang hingga pada masa kesultanan, dimasa inilah madrasah mendapatkan dukungan penuh dan bantuan dari para sultan. Bahkan, nama madrasah itu ada yang diberi nama sultan tersebut. Akan tetapi, kasus yang berbeda terjadi pada masa kolonial Belanda yang dinilainya madrasah tersebut merupakan sekolah liar. Karena hal ini akan menjadi sebuah penghambat dikemudian harinya. Oleh karena itu, pemerintah kolonial memberlakukan sebuah peraturan akan pembatasan dan menutup sebuah sekolah partikelir, termasuk madrasah.

Melihat semua peraturan pemerintah kolonial yang dirasa menekan terhadap pribumi, maka hal tersebut memicu sebuah perlawanan dari golongan pelajar secara masif. Maka dari pada itu pula, pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah satuan badan khusus yang fungsinya untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam dengan sebutan *Preisterraden* pada tahun 1882 (Zuhairini, 1995).

Atas nasihat *Priesterraden* pula, maka kebijakan ordonasi guru oleh pemerintah kolonial Belanda dikeluarkan pada tahun 1905. Kebijakan ini mengharuskan para guru mempunyai surat izin mengajar dari pemerintah kolonial. Jika dicermati, maka ordonansi

guru ini sebenarnya merupakan politik, guna mensiasati maraknya laju perkembangan ilmu pengetahuan yang didapat oleh kaum pribumi.

Memasuki babak perkembangan dari pada kebijakan ordonansi guru, terjadi pada tahun 1932. Pada tahun ini, pemerintah kolonial Belanda kembali membuat sebuah peraturan baru yang disebut dengan ordonansi sekolah liar (*Wilde School Ordonantie*). Ketentuan dari kebijakan ordonansi sekolah liar ini, guna melihat sebuah perkembangan akan sekolah partikelir seperti madrasah yang dinilai mewariskan semangat jihad kepada para santri, dimana hal ini sangat dikhawatirkan oleh kolonial Belanda. Maka dari pada itu, para guru madrasah atau yang biasa disebut ulama dan ustadz wajib memberikan laporan secara berkala kepada pemerintah kolonial Belanda. Arti dari pada ketentuan tersebut ialah penyelenggaraan pendidikan harus seizin pemerintah kolonial Belanda.

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda banyak sekali kurang diuntungkan, bahkan sampai berlanjut pada masa kependudukan Jepang di Nusantara. Meskipun terjadi berbagai pembaharuan, patut diakui bahwa penjajah Jepang lebih memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia dibandingkan dengan penjajah Belanda. Sekalipun yang menjadi dasar utama pemerintahan Jepang lebih kearah menguasai Indonesia.

Berbagai siasat Jepang lakukan untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam, hal yang mereka lakukan seperti mengeluarkan kebijakan berupa bantuan dana untuk sekolah dan madrasah. Sekalipun sifatnya berbeda, bahkan Jepang membuka madrasah-madrasah yang ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda, pemerintahan Jepang ini tetap mengawasi laju perkembangan dari pada sebuah madrasah. Mereka menilai, bahwa madrasah itu mempunyai sebuah potensi untuk merusak dan menghilangkan tataran pemerintahannya di Indonesia.

### **Madrasah di Indonesia pada Masa Pasca Kemerdekaan**

Pasca kemerdekaan Indonesia, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) melakukan usaha-usahanya dalam bidang pendidikan, pada tanggal 29 Desember 1945 BP KNIP tersebut merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan untuk segera melakukan pembaharuan pendidikan dan pengajaran, dalam rekomendasi tersebut juga disinggung mengenai madrasah dan pesantren untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah (Gunawan, 1986).



Maka Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada saat itu yaitu Dr. Mr. T.S.G Mulia membentuk sebuah komisi khusus dengan nama Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja. Mengenai pendidikan agama, panitia tersebut merekomendasikan hal-hal berikut, yaitu:

- 1) Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah,
- 2) Para guru dibayar oleh pemerintah,
- 3) Pada Sekolah Dasar, pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV,
- 4) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu,
- 5) Para guru agama diangkat oleh Departemen Agama,
- 6) Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum,
- 7) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama,
- 8) Diadakan latihan untuk para guru agama,
- 9) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan
- 10) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan (Rahim, 2001).

Pemerintah Republik Indonesia tetap membina pendidikan agama dan keagamaan yang ditangani oleh Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama) sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD/1946 tertanggal 3 Januari 1946 (Steenbrink, 1986). Langkah pertama Depag adalah memberikan pembinaan terhadap keberadaan madrasah dengan memberikan pengadaan sarana dan prasarana dan biaya operasional sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946 tertanggal 19 Desember 1946. Lalu disempurnakan pada tahun 1952 melalui peraturan Menteri Agama Nomor 7/1952 (Rahim, 2001).

Sejak bulan Desember 1946, sebuah pengajaran akan pendidikan Agama Islam mulai diatur oleh pemerintah. Dimana sebelumnya, hal tersebut dinamakan pelajaran budi pekerti pada masa pemerintahan Jepang yang telah berjalan di berbagai daerah di Indonesia.

Memasuki tahap perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan itu tidak bisa dipungkiri dengan perannya sebuah Departemen Agama yang secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama ini terus menerus memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Tujuan utama dari padanya ialah, agar pendidikan Islam itu bisa diselenggarakan di sekolah-sekolah umum. Hal tersebut juga mendapat dukungan penuh dari kalangan umat Islam. Lebih tepatnya, mengenai permasalahan ini ditangani oleh

suatau badan khusus. Tugas dan fungsi Departemen Agama dikala itu ialah: memberikan sebuah pengajaran ilmu agama disekolah-sekolah umum, memberikan ilmu pengetahuan di sekolah agama dengan tujuan agar saling melengkapi satu sama lainnya, dan mengadakan pendidikan serta pelatihan bagi calon guru agama dan sekaligus memberikan pendidikan dan pelatihan bagi calon hakim Islam Negeri.

Melihat tugas dari pada Departemen Agama diatas, menunjukan bahwasanya Departemen Agama merupakan suatu bentuk kepanjangan tangan Umat Islam dalam memperjuangkan sekaligus menyelenggarakan akan sebuah pendidikan Islam secara meluas di Indonesia. Hubungan mengenai perkembangan madrasah, Departemen Agama tersebut menjadi ujung tombak yang secara politis dapat mengangkat citra madrasah dan memperoleh perhatian khusus dari berbagai kalangan pemimpin dimasa itu dengan kebijakannya. Hal tersebut sebenarnya merupakan lanjutan dari pada sejumlah tokoh-tokoh Islam seperti *almarhum almagfurlah* K.H. Hasyim Asyari dan lain lain. Secara lebih tajam, tugas dari Departemen Agama ialah mengembangkan akan program-program secara meluas dan meningkatkan mutu sebuah pendidikan.

Pada masa orde lama, tahap perkembangan madrasah dapat mendirikan sebuah jenjang khusus bagi calon guru agama yang biasa disebut sebagai Pendidikan Guru Agama (PGA) dan bagi calon hakim Islam yang biasa disebut dengan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) (Maksum, 1999b). Hal ini merupakan sebuah bentuk terobosan baru pada perkembangan madrasah dikarenakan dapat mendirikan dua lambaga itu. Selain itu, bisa dikatakan pula sebagai momentum terpenting dari laju perkembangan madrasah, karena pendidikan tersebut dapat mencetak cikal bakal kader yang militan dalam keprofesiannya guna mengembangkan agama Islam, selain itu dapat pula mencetak calon guru agama yang secara khusus berdaya juang pada masalah pendidikan Islam.

Jika dilihat secara kacamata sejarah, PGA tersebut sudah hadir pada masa sebelum kemerdekaan tepatnya di wilayah Minangkabau. Namun, dengan pendirian PGA oleh Departemen Agama ini secara lebih lanjut mendapatkan jaminan yang strategis. Contohnya ialah, PGA dapat menghasilkan seorang guru agama yang secar praktis menjadi sebuah motor penggerak akan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah. Dimana ketersediaan guru yang diberikan dari lembaga tersebut seperti dapat menjamin akan berlangsungnya perkembangan Islam di Indonesia (Drajat, 2018).

Mengutip pada catatan Ainurrofik yang dikutipnya pula dari Mahmud Yunus, adanya sebuah Pendidikan Guru Agama (PGA) pada masa itu merupakan sebuah terobosan baru dari Departemen Agama dengan penanggung jawab oleh Abdullah Sigit dari bagian pendidikan. Pada tahun 1950, lembaga ini mengalami sebuah perkembangan kembali dengan membagi menjadi dua akan lembaga pendidikan seperti adanya Sekolah Guru Agama Islam (SGAI).

Pada praktiknya, sekolah ini dibagi atas dua jenjang. Pertama, jenjang jangka panjang selama lima tahun diperuntukan bagi siswa lulusan Sekolah Rakyat atau Madrasah Ibtidaiyah dan jenjang jangka pendek yang hanya ditempuh selama dua tahun diperuntukan untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kemudian, pada perkembangan selanjutnya Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) ini berubah nama menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan SGHI pula berubah menjadi Sekolah Hakim Guru Agama (SHGA) (Ainurrofiq et al., 2005).

## KESIMPULAN

Pengertian madrasah dalam hemat penulis adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang dikelola dengan manajemen dan kurikulum yang modern tanpa meninggalkan khazanah keilmuan Islam pada masa sebelumnya. Madrasah sudah ada sejak zaman nabi Muhamamd Saw., sistem pendidikan madrasah pada zaman Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat adalah menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, namun fungsi masjid jauh lebih dari itu, salah satunya sebagai pusat pendidikan Islam. Pada perkembangan berikutnya maka lahirlah masjid *khan* yaitu masjid yang mempunyai fasilitas asrama bagi para penuntut ilmu. Madrasah ini terus berkembang sampai pada zaman kejayaan Islam dengan dibangunnya madrasah-madrasah di Naisaphur Iran dan Madrasah Nidzamiyah di Bagdad. Sistem pendidikan madrasah masuk ke Nusantara pada abad ke-20 atau pada masa akhir penjajahan Belanda di Indonesia, ketika pemerintahan Belanda di Indonesia berkuasa, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami sikap diskriminatif terhadap lembaga pendidikan Islam karena penjajah Belanda khawatir dengan adanya madrasah tersebut. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, madrasah dibebaskan untuk melakukan aktivitasnya, hal ini semata-mata Jepang lakukan untuk menarik hati umat Islam terhadap Jepang. Sedangkan perkembangan madrasah setelah Indonesia merdeka adalah dengan

diakomodasinya lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah oleh pemerintah melalui departemen agama (sekarang kementerian agama) sehingga mendapatkan perhatian lebih dengan mendapatkan dana operasional dan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana, tidak hanya itu pendidikan agama juga dimasukkan di sekolah umum, dan pengajaran umum juga harus diberikan di sekolah Islam. Terakhir dalam rangka memajukan pendidikan Islam, maka dibuatlah dua lembaga yaitu Sekolah Guru Agama Islam dan Sekolah Hakim Guru Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq et al., A. (2005). *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Yogyakarta: Listafariska Putra.
- Alawiyah, F. (2014). Pendidikan Madrasah di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 5(1), 51–58. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.449>
- Asari, H. (1994). *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*. Bandung: Mizan.
- Drajat, M. (2018). Sejarah Madrasah Di Indonesia. *Journal for Islamic Studies*, 1(1), 196–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161729>
- Dzaelani, D. (1982). *Kebijakan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*. Jakarta: Dirjenaga.
- Fathoni, H. (2020). Perkembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia. *Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri*, (51), 73–98. Retrieved from <https://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/41>
- Fadhli, A. (2022). Kontribusi Pesantren Sebelum Kemerdekaan dalam Membentuk Karakter Umat di Indonesia. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(2), 148-157.
- Gunawan, A. H. (1986). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Haningsih, S. (2008). Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia. *El-Tarbawi*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art3>
- Hasbullah, H. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kosim, M. (2007). Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan). *Tadris*, 2(1), 41–57.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Maksum, M. (1999a). *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Maksum, M. (1999b). *Sejarah Madrasah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Masykur, M. R. (2018). Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Jurnal Al-Makrifat*, 3(2), 31–45. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/article/view/3205>
- Mircea, E. (1993). *The Encyclopedia of Religion*. Newyork: Mac Millan Publishing Company.
- Nasir, M. (2017). Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 11(24), 1–18. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.8>
- Nurjaman, A., Yusuf, M., & Witro, D. (2021). Islamic Boarding School People in Politics (Case Study of Miftahul Huda Islamic Boarding School Manonjaya Tasikmalaya). *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(2), 160–169. <https://doi.org/10.52048/inovasi.v15i2.240>
- Rahim, H. (2001). *Arab Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Rasiin, R. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa.
- Sauri, S. (2020). Sejarah Perkembangan Bahasa Arab Dan Lembaga Islam di Indonesia. *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, 5(1), 73–88. <https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v5i1.1332>
- Shaleh, A. R. (2004). *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Persepektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren madrasah sekolah: pendidikan Islam dalam kurun modern*. Jakarta: Dharma Aksara Perkasa.
- Supani, S. (1970). Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia. *INSANLA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 14(3), 560–579. <https://doi.org/10.24090/insania.v14i3.376>
- Syalabi, A. (1983). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Alhusna.
- Thoah, A. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Zuhairini, Z. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.